

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.36 TAHUN 2008
(Studi Kasus Terhadap Laporan Keuangan KUD Karya Sembada
Desa Batang Batindih Kab. Kampar tahun 2012)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti ujian oral comprehensive
Strata (S.1) pada Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

OLEH:

SUSI HASMI
NIM. 10973008280



PROGRAM S.1

**JURUSAN AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2013

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.36 TAHUN 2008
(Studi Kasus Terhadap Laporan Keuangan Kud Karya Sembada
Desa Batang Batindih Kab. Kampar Tahun 2012)**

SKRIPSI

OLEH:

SUSI HASMI
NIM. 10973008280



PROGRAM S.1

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2013

ABSTRAK

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.36 TAHUN 2008

Oleh: Susi Hasmi

Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Unit Desa Karya Sembada bergerak dibidang Usaha Simpan Pinjam, Angkutan Sawit, Waserda, Sarana Produksi dan Pembelian TBS yang terletak di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Dari uraian latar belakang masalah dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu koperasi karya sembada telah terdaftar sebagai wajib pajak namun koperasi karya sembada belum pernah melakukan perhitungan pajak penghasilan badan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan badan yang akan dilakukan pada KUD karya sembada menurut undang-undang No.36 Tahun 2008. Jenis dan sumber data yang digunakan penulis adalah data primer dan data skunder. Data primer yaitu data-data yang diperoleh secara langsung dari pengurus dan karyawan koperasi mengenai kegiatan usaha dan sejarah perkembangan koperasi sedangkan data sekunder adalah data yang mencakup pembukuan dan catatan-catatan akuntanasi seperti laporan perhitungan laba rugi dan neraca. data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan meode analisis deskriptif komparatif.

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan hasil dari perhitungan pajak penghasilan terutang badan setahun sebesar Rp 56.631.921 dan kewajiban PPh Pasal 25 atas pajak PPh pasal 29 tahun mendatang yang harus diangsur sebesar Rp 4.719.328. Diharapkan kepada pihak koperasi mengacu pada hasil penelitian ini, agar pihak koperasi melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak dan dalam perhitungan pajak penghasilan badan lebih memperhatikan hal-hal yang sesuai dengan peraturan perpajakan dan juga memperhatikan penghitungan penyusutan aktiva tetap yang benar baik secara komersial maupun fiskal.

Kata kunci : Pajak Penghasilan Badan, PPh Pasal 29, PPh Pasal 25.

KATA PENGANTAR

AssalamualaikumWr, Wb

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, berkat taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Perhitungan Pajak Panghasilan Badan Berdasarkan Undang-undang No.36 Tahun 2008 Terhadap Laporan Keuangan KUD Karya Sembada Tahun 2012”.

Shalawatdan Salam tidak lupa penulis hantarkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan dan kebodohan menuju alam yang terang benderang dan penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Penulis telah mencurahkan segala kemampuan dalam menyelesaikan skripsi ini, tetapi lepas dari semuanya itu mengingat penulis juga masih dalam tahap belajar, tentunya tak luput dari berbagai kekurangan dan ketidak-sempurnaan, namun inilah hasil maksimal yang dapat penulis berikan. Penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Hasan Basri dan Ibunda Sukatmi tersayang atas segala pengorbanan, doa dan motivasi yang telah diberikan. Penyelesaian laporan skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak rektor UIN SUSKA Riau (Prof. DR. M. Nazir MA) beserta staf.
2. Bapak Mahendra Ramos, M.EC, P.hd selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak Drs. Almasri M.Si selaku Pembantu Dekan I, Bapak Drs. Alpizar. M.Si selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Drs. H. Zamharil MM. Pembantu Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
4. Bapak Dony Martias SE, MM. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
5. Ibu Desrir Miftah, SE, MM, Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi.
6. Ibu Susnaningsih Mu'at, SE, MM selaku pembimbing yang telah memberikan banyak bantuan dan masukan serta arahan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Hesty selaku Dosen konsultasi yang telah memberikan banyak bantuan dan arahan dalam penulisan proposal.
8. Bapak Dr. Azhari S.MA, Ak selaku dosen kursus pajak yang banyak membantu dan memberikan ilmu pengetahuan perpajakan.
9. Bapak/ ibu dosen serta karyawan/i Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah sabar memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan selama penulis melaksanakan perkuliahan.
10. Pengurus Koperasi Unit Desa Karya Sembada yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan data-data yang di perlukan dalam pembuatan skripsi ini.
11. Terima kasih rekan-rekan Ak E Lover's 09 yang telah memberikan informasi dan semangat untuk menyelesaikan perkuliahan.

12. Sehabat-sehabat saya ante arsyanti, cecey, inui, mbak yuli, dedew, novi Aryanti. Terima kasih untuk semua, untuk dukungan dan semangatnya.

13. Terima kasih semua sanak saudara serta rekan-rekan yang tak bisa di ucapkan satu persatu.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari apa yang diharapkan, sehingga memerlukan penyempurnaan sedemikian rupa. Sebab dalam kajian ilmiah terdapat kelemahan dan kekurangan baik dari segi tulisan maupun rujukan yang diperlukan serta analisis dan interpretasi yang diberikan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhir atas segala bantuan semua pihak, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga semua ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal'alamiin

Pekanbaru, Mei 2013

Susi Hasmi

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Sistematika Pembahasan	4
 BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Koperasi	6
2.1.1 Defenisi Koperasi	6
2.1.2 Jenis-jenis Koperasi	7
2.2 Akuntansi	8
2.2.1 Pengertian Akuntansi	8
2.2.2 Akuntansi Koperasi	8
2.2.3 Akuntansi Pajak	12
2.3 Pajak Penghasilan	13
2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan	13

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan	13
2.3.3 Tarif Pajak Penghasilan	13
2.3.4 Subjek Pajak Penghasilan	15
2.3.5 Objek Pajak Penghasilan	17
2.3.6 Pengurang Penghasilan Bruto	23
2.3.7 Penghasilan Yang Dikenai Tarif Final.....	27
2.3.8 Kredit Pajak	28
2.4 Rekonsiliasi Fiskal	30
2.4.1 Faktor-faktor Penyebab Koreksi Fiskal.....	30
2.4.2 Jenis-jenis Koreksi Fiskal.....	32
2.4.3 Koreksi Fiskal Negatif.....	36
2.4.4 Koreksi Fiskal Positif.....	37
2.5 PPh Badan ditinjau dari UU No. 36 Tahun 2008	38
2.6 Pajak Dalam Pandangan Islam.....	43

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian	45
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	45
3.3 Metode Pengumpulan Data	45
3.4 Metode Analisis	46

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Latar Belakang Berdirinya Perusahaan.....	47
4.2 Struktur Organisasi.....	48
4.3 Uraian Tugas	50
4.4 Aktivitas Koperasi	51

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Laporan Keuangan Koperasi Karya Sembada.....	52
4.2 Laporan Keuangan Menurut Akuntansi dan UU Perpajakan.....	55
4.3 Koreksi Fiskal Pada KUD Karya Sembada	62
4.4 Perhitungan PPh Pasal 29 dan Pasal 25.....	67
4.5 Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.....	67

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	76
6.2 Saran-saran	77

DAFTAR PUSTAKA	78
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	80
-----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Pengelompokan Harta Berwujud, Metode dan tarif penyusutan.....	33
Tabel II.2	Pengelompokan Harta Tak Berwujud, Metode dan tariff penyusutan...	34
Tabel V.1	Neraca KUD Karya Sembada	53
Tabel V.2	Laporan Perhitungan Hasil Usaha KUD Karya Sembada.....	54
Tabel V.3	Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Koperasi.....	58
Tabel V.4	Penyusutan Aktiva Tetap Menurut UU Perpajakan.....	61
Tabel V.5	Perbandingan Penyusutan Menurut Koperasi Dengan UU Perpajakan...	62
Tabel V.6	Rekonsiliasi Fiskal Laporan Laba Rugi Pada KUD Karya Sembada.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1 Struktur Organisasi KUD Karya Sembada.....	49
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar dan sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Kewajiban perpajakan adalah salah satu perwujudan kewajiban warga negara dan merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Salah satu sumber penerimaan pajak adalah Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam tahun pajak. Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha yang dapat diperoleh melalui berbagai bentuk usaha, termasuk pekerjaan bebas dan penghasilan lainnya. Salah satu Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan adalah Wajib Pajak Badan. Wajib Pajak Badan merupakan Wajib Pajak yang harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan harus melaporkan seluruh kegiatannya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan).

Wajib Pajak diberikan kepercayaan secara penuh untuk melakukan perhitungan pajak sendiri dengan benar, lengkap dan jelas. Jika dalam perhitungan PPh terutang setelah dikurangi dengan kredit pajak terdapat PPh Kurang Bayar maka

hal itu merupakan PPh Pasal 29 dan PPh terutang setelah dikurangi PPh potong pungut dibagi 12 bulan maka hal itu merupakan angsuran pasal 25 untuk tahun yang akan datang.

Kemudian perlu ditambahkan bahwa dalam perhitungan dan pemungutan pajak penghasilan badan seringkali terjadi perbedaan antara pajak penghasilan yang telah dihitung (komersial) dengan perhitungan menurut fiskus. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan mengenai pengakuan pendapatan, biaya dan laba dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang ditetapkan oleh fiskus. Akibat dari adanya perbedaan pengakuan pendapatan, biaya dan laba antara menurut komersial dengan fiskus, maka perlu dilakukan penilaian mengenai cara perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan dengan fiskus. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menentukan pajak penghasilan badan (terutang) menurut Undang-undang Perpajakan No. 36 tahun 2008.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan diatas yang merupakan pengetahuan umum yang seringkali tidak diketahui oleh Wajib Pajak dan melihat akan pentingnya penilaian pajak penghasilan badan menurut Undang-undang perpajakan, maka perlunya dilakukan analisis mengenai perhitungan pajak penghasilan badan yang sesuai dengan Undang-undang Perpajakan. Demikian halnya dengan KUD Karya Sembada yang menjadi objek penelitian. Koperasi Karya Sembada bergerak dibidang Usaha Simpan Pinjam, Angkutan Sawit, Waserda, Sarana Produksi dan Pembelian TBS. Selama ini Koperasi Karya Sembada telah

terdaftar sebagai Wajib Pajak namun belum melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak yaitu menghitung, menyetor dan melaporkan perpajakannya.

Dengan permasalahan tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul : **“Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan Undang-undang No.36 Tahun 2008 Terhadap Laporan Keuangan KUD Karya Sembada tahun 2012”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang penelitian tersebut, maka yang menjadi permasalahan pokok dapat dirumuskan sebagai berikut :“Bagaimana Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan Undang-undang No.36 Tahun 2008 Terhadap Laporan Keuangan KUD Karya Sembada Desa Batang Batindih Kab. Kampar Tahun 2012?”

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan Undang-undang No.36 tahun 2008 Terhadap Laporan Keuangan KUD Karya Sembada Tahun 2012.

1.4 Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian adalah :

- a) Untuk menambah wawasan penulis tentang perhitungan pajak penghasilan badan terhadap laporan keuangan Koperasi Unit Desa dalam rangka memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak terhadap Negara.
- b) Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak koperasi dalam menghitung PPh badan pada masa yang akan datang.
- c) Dengan penelitian ini penulis juga mengharapkan kiranya dapat dijadikan sebagai suatu perbandingan dalam penelitian selanjutnya dengan masalah yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini dibagi atas lima (5) bab, dan tiap-tiap bab dibagi beberapa sub bagian, adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II : Tinjauan pustaka, akan menguraikan kerangka teoritis mengenai akuntansi dan perpajakan sesuai dengan tujuan penelitian.
- BAB III : Metode penelitian, akan menguraikan lokasi penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data.

- BAB IV : Gambaran umum koperasi, berisikan tentang sejarah singkat koperasi, struktur organisasi, uraian tugas dan kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh koperasi
- BAB V : Hasil penelitian dan pembahasan, dengan cara membandingkan teori yang dibahas pada bab II dengan praktek yang diterapkan badan usaha koperasi.
- BAB VI : Kesimpulan dan saran, yang berisikan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan membuat saran-saran yang dianggap perlu.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Koperasi

2.1.1 Defenisi Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Dengan demikian, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional. (Rudianto, 2010 : 3).

Sedangkan Menurut UU No. 25 tahun 1992 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. Selanjutnya PSAK No 27, menyebutkan bahwa karakteristik utama koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda (*the dual identity of the member*), yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi (*user own oriented firm*).

2.1.2 Jenis Koperasi

Menurut IAI koperasi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis koperasi, yaitu :

a. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana.

b. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa.

c. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa. Koperasi pemasaran dibentuk terutama untuk membantu para anggotannya memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan.

d. Koperasi Produsen

Koperasi Produsen adalah koperasi yang para anggotanya tidak memiliki badan usaha sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa.

2.2 Akuntansi

2.2.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Riahi dan Belkaoui (2006:50), mendefinisikan akuntansi adalah Seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dan satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang piling tidak sebagian di antaranya, memiliki sifat keuangan, dan selanjutnya menginterpretasikan hasilnya.

Akuntansi telah didefinisikan berkaitan dengan konsep dari informasi kuantitatif yaitu Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa. Fungsinya adalah untuk memberikan informasi kuantitatif dari entitas ekonomi, terutama bersifat keuangan dan dimaksudkan untuk bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi, dan dalam menentukan pilihan diantara serangkaian tindakan-tindakan alternative yang ada.

Sedangkan menurut Muljono (2006: 1), Akuntansi adalah : Urutan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian dengan cara tertentu atas transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi serta penafsiran terhadap hasilnya.

2.2.2 Akuntansi Koperasi

Laporan keuangan koperasi Menurut IAI, meliputi:

1. Neraca Neraca menyajikan informasi mengenai Aktiva, Kewajiban, dan Ekuitas Koperasi pada waktu tertentu.

2. Perhitungan Hasil Usaha (PHU) harus memuat hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non-anggota.
3. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas dan saldo akhir kas pada periode tertentu.
4. Laporan Promosi Ekonomi Anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu. Laporan tersebut mencakup empat unsur, yaitu:
 - a. Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama.
 - b. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama.
 - c. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi.
 - d. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha.
5. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan pengungkapan yang memuat:
 - a. Perlakuan akuntansi antara lain mengenai:
 - 1) Pengakuan pendapatan dan beban sehubungan dengan
 - 2) Transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota
 - 3) Kebijakan akuntansi tentang aktiva tetap, penilaian
 - 4) Persediaan, piutang dan sebagainya.
 - 5) Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non anggota

b. Pengungkapan informasi lain antara lain:

- 1) Kegiatan atau pelayanan utama koperasi kepada anggota baik yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun dalam praktek, atau yang telah dicapai oleh koperasi.
- 2) Aktivitas koperasi dalam pengembangan sumber daya dan mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha, manajemen yang diselenggarakan untuk anggota dan penciptaan lapangan usaha baru untuk anggota.
- 3) Ikatan atau kewajiban bersyarat yang timbul dan transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota.
- 4) Pengklasifikasian piutang dan hutang yang timbul dari transaksi koperasi dengan anggota dan non- anggota.
- 5) Pembatasan penggunaan dan risiko atas aktiva tetap yang diperoleh atas dasar hibah atau sumbangan.
- 6) Aktiva yang dioperasikan oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi.
- 7) Aktiva yang diperoleh secara hibah dalam bentuk pengalihan saham dari perusahaan swasta.
- 8) Pembagian sisa hasil usaha dan penggunaan cadangan.
- 9) Hak dan tanggungan pemodal modal penyertaan.
- 10) Penyelenggaraan rapat anggota, dan keputusan-keputusan penting yang berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan.

Dalam akun-akun neraca terdapat perbedaan akuntansi perkoperasian dengan akuntansi keuangan umumnya yang dijelaskan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27:

1. Simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain dari anggota diakui sebagai kewajiban ataupun ekuitas tergantung dari karakteristiknya. simpanan Anggota yang berkarakteristik sebagai ekuitas adalah sejumlah tertentu dalam nilai uang yang diserahkan oleh anggota pada koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan dan dapat diambil sewaktu-waktu sesuai perjanjian. Simpanan ini tidak menanggung risiko kerugian dan sifatnya sementara karenanya diakui sebagai kewajiban.
2. Aktiva yang diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutup kerugian koperasi diakui sebagai aktiva lain-lain. Sifat keterikatan penggunaan tersebut dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.
3. Aktiva-aktiva yang dikelola oleh koperasi, tetapi bukan milik koperasi, tidak diakui sebagai aktiva dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Misalnya aset milik anggota yang juga dikelola koperasi karena koperasi tugas koperasi sebagai sarana pendidikan anggotanya.
4. Pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan non-anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi. Selisih

antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non-anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan non- anggota.

5. Beban usaha dan beban-beban perkoperasian harus disajikan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha.
6. Sisa hasil usaha tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi. Dalam hal jenis dan jumlah pembagian sisa hasil telah diatur secara jelas maka bagian yang tidak menjadi hak koperasi diakui sebagai kewajiban. Apabila jenis dan jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas, maka sisa hasil usaha tersebut dicatat sebagai sisa hasil usaha belum dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

2.2.3 Akuntansi Pajak

Akuntansi yang dilaksanakan oleh perusahaan atau organisasi pada umumnya mengacu pada Prinsip Akuntansi atau Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dalam pengertian ini disebut Akuntansi Komersial. Akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan berserta aturan pelaksanaannya disebut Akuntansi Perpajakan. Akuntansi perpajakan meliputi penyusunan surat pemberitahuan pajak, serta mempertimbangkan konsekuensi perpajakan dari transaksi usaha yang direncanakan atau mencari alternatif pelaksanaan terbaik. (Muljono, 2006:1)

2.3 Pajak Penghasilan

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Ketentuan umum tentang Pajak Penghasilan menurut UU Perpajakan No. 36 tahun 2008 menyatakan bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Undang-Undang ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subyek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subyek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang ini disebut wajib pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1991, Undang-undang Nomor 10 tahun 1994, Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 mengatur mengenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan.

2.3.3 Tarif Pajak Penghasilan

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, besarnya tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi

wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, sebagai berikut :

a. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) s.d. Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Sumber: Undang-undang No.36 tahun 2008 Pasal 17 ayat (1a).

- b. Tarif tertinggi Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Menurut pasal 17 ayat (2a) tarif PPh untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap ini sejak tahun pajak 2010 nanti tarif tunggal ini menjadi 25% (dua puluh lima persen).
- c. Pengurangan Tarif 50% bagi Wajib Pajak Badan

Bagi sebagian Wajib Pajak mungkin belum mengetahui bahwa Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) No. 36 Tahun 2008 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2009 memberikan fasilitas berupa pengurangan tarif PPh bagi Wajib Pajak badan sebesar 50%, yang diberikan untuk penghasilan sampai dengan

sebesar Rp. 4.800.000.000. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 31 E UU

PPh No.36 Tahun 2008, yang berbunyi :

- 1) Wajib Pajak dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,- mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,-.
- 2) Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.3.4 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Purwono (2010:87), Subjek Pajak merupakan segala sesuatu yang berpotensi untuk menerima atau memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran dikenakannya pajak penghasilan. Yang menjadi subjek penghasilan adalah :

- 1) Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi.
- 2) Badan, termasuk di dalamnya Bentuk Usaha Tetap.

Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang di gunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau yang tinggal di Indonesia <183 hari dalam waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan/ berkedudukan di Indonesia namun menjalankan usaha/kegiatan di Indonesia. Menurut UU PPh, subjek pajak dibedakan antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah

menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak, sedangkan subjek pajak luar negeri sekaligus menjadi wajib pajak, jika memperoleh penghasilan di Indonesia atau di peroleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Sedangkan yang bukan termasuk subjek pajak adalah :

- a. Badan perwakilan negara asing
- b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat :
 - 1) Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain dari luar jabatannya di Indonesia.
 - 2) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi-organisasi internasional, dengan syarat :
 - 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, dan
 - 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri keuangan dengan syarat:
 - 1) Bukan warga negara Indonesia
 - 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

- e. Unit tertentu dari badan pemerintahan dengan syarat:
 - 1) Dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Dibiayai dari Anggaran pemerintah Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD).
 - 3) Penerimaan lembaga tersebut masuk ke anggaran pemerintah.
 - 4) Pembekuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

2.3.5 Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan wajib pajak, bukan kekayaan atau pengeluaran atau konsumsinya. Dalam Undang-undang No.36 tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) yang termasuk objek pajak adalah:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba Usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - 2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.

3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
 - f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 - g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 - h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.

- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah.
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- s. Surplus Bank Indonesia.

Yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan badan menurut Undang-undang No.36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (3) adalah:

- a) 1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia,

yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

b) Warisan;

c) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;

d) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

e) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;

- f) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- g) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j) Dihapus;

- k) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
- 1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- l) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- m) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- n) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.3.6 Pengurang Penghasilan Bruto

Menurut Undang-undang PPh No.36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) Biaya-biaya yang diperkenankan bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha dalam menentukan penghasilan kena pajak adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan, termasuk :

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 1. Biaya pembelian bahan.
 2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorium, bonus, grafikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.
 3. Bunga, sewa, dan royalty.
 4. Biaya perjalanan
 5. Premi asuransi.
 6. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 7. Biaya administrasi.
 8. Pajak kecuali Pajak Penghasilan.
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.

- d. Kerugian kerana penjualan atau pengalihan harta yang di miliki dan di gunakan dalam perusahaan atau yang di miliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- e. Kerugian selisih kurs mata uang asing.
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - 1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
 - 2. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jendral Pajak.
 - 3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.
 - 4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- k. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya di atur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Undang-undang pajak penghasilan No.36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat

(1) Biaya-biaya yang tidak diperkenankan untuk mengurangi penghasilan bruto dalam menentukan penghasilan kena pajak adalah :

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali :
 - 1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.
 - 2) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 - 3) Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan.
 - 4) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.
 - 5) Cadangan biaya penanaman kembali untuk sawah kehutanan.

- 6) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industry.
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima

oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- h. Pajak Penghasilan.
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.3.7 Penghasilan Yang Dikenai Tarif Final

Menurut Undang-undang PPh No.36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2) Penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final adalah sebagai berikut :

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. Penghasilan berupa hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;

- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2.3.8 Kredit Pajak

Kredit pajak yang dapat dikurangkan terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun adalah pajak penghasilan yang telah dilunasi dalam tahun berjalan oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, baik yang dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tersebut ataupun yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain, berupa: (Pratama, 2013)

1. Pemotong pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan.
2. Pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-undang Pajak Penghasilan.
3. Pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalty, sewa, hadiah dan penghargaan, dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan.

4. Pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-undang Pajak Penghasilan.
5. Pembayaran dilakukan oleh wajib pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-undang Pajak Penghasilan.
6. Pemotongan Pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu :
 - a) Pemotongan pajak atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - b) Pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalty, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terhadap hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.
 - c) Pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku tidak boleh dikreditkan dengan pajak yang terutang. Pengurangan pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan akan menghasilkan :

1. Pajak penghasilan yang terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar daripada jumlah kredit pajak (kurang bayar)
2. Pajak penghasilan yang terutang untuk suatu tahun pajak lebih kecil daripada jumlah kredit pajak (lebih bayar)

2.4 Rekonsiliasi Fiskal

Menurut Supriyanto (2011: 132) Rekonsiliasi Fiskal adalah suatu proses penyesuaian-penyesuaian laporan laba/rugi fiskal berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan di Indonesia sehingga diperoleh laba/ rugi fiskal sebagai dasar untuk perhitungan pajak penghasilan untuk satu tahun tertentu. Koreksi fiskal dilakukan baik terhadap penghasilan maupun terhadap biaya-biaya (pengurang penghasilan bruto).

2.4.1 Faktor-Faktor Penyebab Koreksi Fiskal

Menurut Resmi (2009: 392), penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya.

1. Perbedaan prinsip akuntansi

Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum (Standar Akuntansi Keuangan) yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis tetapi tidak diakui dalam fiskal.

2. Perbedaan metode dan prosedur akuntansi

- a. Metode penilaian persediaan.
- b. Metode penyusutan dan amortisasi.
- c. Metode penghapusan piutang.

3. Perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya.

- a. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan.
- b. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi pengenaan pajaknya bersifat final.
- c. Perbedaan lain yang berasal dari penghasilan adalah:
 - Kerugian suatu usaha diluar negeri.
 - Kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya.

4. Imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajiban. Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal, pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Sehingga dalam SPT Tahunan PPh, merupakan koreksi fiskal positif. Contoh: diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh.

2.4.2 Jenis-Jenis Koreksi Fiskal

Jenis koreksi fiskal merupakan jenis-jenis perbedaan antara akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal, yaitu terdiri dari :

1. Beda Tetap (*Permanent Differences*)

Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dengan pajak, yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi komersial namun tidak diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Sehingga akan mengakibatkan laba/rugi menurut akuntansi (*pre tax Income*) berbeda secara tetap dengan laba kena pajak menurut fiskal (*taxable income*).

2. Beda Waktu (*Timing Differences*)

Adalah perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial tapi belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Biasanya perbedaan ini bersifat sementara. Perbedaan ini, diakibatkan oleh perbedaan metode dalam hal: Akrua dan realisasi, Penyusutan harta berwujud, amortisasi harta tak berwujud, Penilaian persediaan, dan Kompensasi kerugian fiskal.

a. Penyusutan

Penyusutan (depresiasi) merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap berwujud. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008

pasal 11 ayat 6, harta berwujud dibagi menjadi dua golongan, yaitu bukan bangunan dan bangunan.

Tabel II.1: Pengelompokan Harta Berwujud, Metode, serta Tarif Penyusutan

KELOMPOK HARTA BERWUJUD	MASA MANFAAT	TARIF DEPRESIASI	
		GARIS LURUS	SALDO MENURUN
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	-
Tidak permanen	10 tahun	10%	-

Sumber: UU PPh No.36 Tahun 2008

Dari tabel diatas, terlihat bahwa ada dua metode yang digunakan dalam melakukan penyusutan, yaitu metode garis lurus (*straight line method*) dan metode saldo menurun (*declining balance method*). Metode garis lurus (*straight line method*) adalah metode yang digunakan untuk semua kelompok harta tetap berwujud. Sedangkan metode saldo menurun (*declining balance method*) adalah metode yang digunakan untuk kelompok harta berwujud bukan bangunan saja. (Mardiasmo:2009:153)

Dalam melakukan penyusutan, wajib pajak diperkenankan untuk memilih salah satu metode yang akan digunakan. Penyusutan dapat dimulai pada saat:

1. Bulan dilakukannya pengeluaran.
2. Untuk harta yang masih dalam pengerjaan, penyusutan dimulai pada bulan pengerjaan harta tersebut selesai.
3. Dengan ijin dari dirjen pajak, penyusutan dapat dimulai pada bulan harta berwujud mulai digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan.

b. Amortisasi

Amortisasi adalah konsep alokasi harga perolehan harta tetap tidak berwujud dan harga perolehan harta sumber alam. Harta tak berwujud juga dikelompok menjadi beberapa kelompok. Berikut pengelompokan dan tarif amortisasi menurut Undang-Undang PPh No 36 Tahun 2008 Pasal 11A ayat 2.

Tabel II.2: Pengelompokan Harta Tak Berwujud, Metode, serta Tarif Amortisasi

KELOMPOK HARTA TAK BERWUJUD	MASA MANFAAT	TARIF AMORTISASI	
		GARIS LURUS	SALDO MENURUN
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

Sumber : UU PPh No.36 tahun 2008

Penetapan masa manfaat dan tarif amortisasi dimaksud untuk memberikan keseragam dalam melakukan amortisasi. Metode yang digunakan sesuai dengan metode yang dipilih berdasarkan masa manfaat yang sebenarnya dari tiap harta tak

berwujud. Jika masa manfaat aset tetap tidak berwujud tidak tercantum pada kelompok masa manfaat yang ada, maka wajib pajak, menggunakan masa manfaat terdekat. Misalnya, masa manfaat yang sebenarnya 5 tahun, maka harta tak berwujud tersebut diamortisasi dengan menggunakan masa manfaat 4 tahun. Ataupun masa manfaat sebenarnya 6 tahun, maka diamortisasi dengan menggunakan masa manfaat 4 atau 8 tahun.

Harga perolehan harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (*goodwill*) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, diamortisasi dengan metode garis lurus (*straight line method*) atau metode saldo menurun (*declining balance method*).

Selain kelompok, metode dan tarif amortisasi seperti disebutkan dalam tabel diatas, berlaku juga untuk:

1. Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan. Pengeluaran ini dapat juga dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran.
2. Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial, misalnya biaya studi kelayakan dan biaya produksi percobaan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Pengeluaran ini dikapitalisasikan kemudian di amortisasi sesuai tabel diatas. Kecuali biaya operasional yang bersifat rutin, seperti biaya rekening listrik dan telepon, gaji pegawai, dan biaya kantor lainnya, tidak boleh dikapitalisasi tetapi dibebankan sekaligus pada tahun pengeluaran.

Adanya perbedaan antara akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal yaitu beda waktu dan beda tetap diatas, maka perlu dilakukan koreksi. Koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi fiskal positif akan menyebabkan laba kena pajak akan bertambah, sedangkan koreksi negatif akan menyebabkan laba kena pajak akan berkurang.

2.4.3 Koreksi Fiskal Positif

Koreksi Fiskal Positif adalah koreksi atau penyesuaian yang akan mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh Badan Terhutangnya juga akan meningkat.

Menurut Muljono (2006), Koreksi positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan pengurangan biaya yang diakui dalam laporan laba rugi komersial menjadi semakin kecil, sehingga akan mengakibatkan penambahan penghasilan. Adapun transaksi yang dapat mengakibatkan adanya koreksi positif antar lain:

- a) Biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan untuk mendapat, menagih, dan memelihara pendapatan.
- b) Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
- c) Biaya yang diakui lebih kecil, seperti penyusutan, amortisasi, dan biaya yang ditanggihkan menurut Wajib Pajak lebih tinggi.
- d) Biaya yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak
- e) Biaya yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final

Menurut Agoes (2012:219), koreksi positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Koreksi positif dilakukan akibat adanya:

- a. Beban yang tidak diakui oleh pajak (*non-deductible expense*).
- b. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal.
- c. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal.
- d. Penyesuaian fiskal positif lainnya.

2.4.4 Koreksi Fiskal Negatif

Koreksi Fiskal Negatif adalah koreksi atau penyesuaian yang akan mengakibatkan menurunnya laba kena pajak yang membuat PPh badan terhutangnya juga akan menurun.

Menurut Muljono (2006), Koreksi negatif adalah koreksi fiskal yang terjadi karena adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi komersial menjadi semakin besar, sehingga mengakibatkan adanya pengurangan penghasilan. Beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan adanya koreksi fiskal negatif antara lain:

- a) Biaya yang diakui lebih besar, seperti: Penyusutan menurut wajib pajak lebih rendah, selisih amortisasi, dan biaya yang ditangguhkan pengakuannya.
- b) Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
- c) Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh final.

2.5 . PPh Badan ditinjau dari UU No. 36 Tahun 2008

Salah satu bentuk reformasi perpajakan di Indonesia adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan melalui proses panjang dan melibatkan stake holder termasuk pengusaha yang mencerminkan keadilan dan kesetaraan kedudukan antara fiskus dan Wajib Pajak. Penurunan tarif, penekanan cost of compliance, law enforcement yang lebih tegas kepada Wajib Pajak tidak patuh, kesetaraan fiskus dan Wajib Pajak merupakan poin-poin dalam tax reform UU PPh. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini disahkan pada tanggal 23 September 2008 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009. Pokok pikiran yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan antara lain sebagai berikut (Darmin Nasution, (2009) dalam Pratama (2013)) :

1. Penurunan Tarif Pajak Penghasilan (PPh)

Penurunan tarif PPh dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan tarif PPh negara-negara tetangga yang relatif lebih rendah sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam negeri, mengurangi beban pajak, dan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP).

- a) Bagi WP orang pribadi, tarif PPh tertinggi diturunkan dari 35% menjadi 30% dan menyederhanakan lapisan tarif dari 5 lapisan menjadi 4 lapisan, namun memperluas masing-masing lapisan penghasilan

kena pajak (income bracket), yaitu lapisan tertinggi dari sebesar Rp 200 juta menjadi Rp 500 juta.

- b) Bagi WP badan, tarif PPh yang semula terdiri dari 3 lapisan, yaitu 10%, 15% dan 30% menjadi tarif tunggal 28% di tahun 2009 dan 25% tahun 2010. Penerapan tarif tunggal dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan prinsip kesederhanaan dan international best practice. Selain itu, bagi WP badan yang telah go public diberikan pengurangan tariff 5% dari tarif normal dengan kriteria paling sedikit 40% saham dimiliki oleh masyarakat. Insentif tersebut diharapkan dapat mendorong lebih banyak perusahaan yang masuk bursa sehingga akan meningkatkan good corporate governance dan mendorong pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi perusahaan.
- c) Bagi WP UMKM yang berbentuk badan diberikan insentif pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang berlaku terhadap bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar. Pemberian insentif tersebut dimaksudkan untuk mendorong berkembangnya UMKM yang pada kenyataannya memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian di Indonesia. Pemberian insentif juga diharapkan dapat mendorong kepatuhan WP yang bergerak di UMKM.
- d) Bagi WP orang pribadi Pengusaha Tertentu, besarnya angsuran PPh Pasal 25 diturunkan dari 2% menjadi 0,75% dari peredaran bruto. Penurunan tarif tersebut dimaksudkan untuk membantu likuiditas WP dengan pembayaran

angsuran pajak yang lebih rendah serta memberikan kepastian dan kesederhanaan penghitungan PPh.

- e) Bagi WP pemberi jasa yang semula dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan netto menjadi 2% dari peredaran bruto. Perubahan tarif tersebut dimaksudkan untuk memberikan keseragaman pemotongan pajak yang sebelumnya ada yang didasarkan pada penghasilan bruto dan sebagian didasarkan pada penghasilan netto. Dengan metode ini, penerapan perpajakan diharapkan dapat lebih sederhana dan tarif relatif lebih rendah sehingga dapat meningkatkan kepatuhan WP.
 - f) Bagi WP penerima dividen yang semula dikenai tarif PPh progresif dengan tarif tertinggi sampai dengan 35%, menjadi tarif final 10%. Penurunan tarif tersebut dimaksudkan untuk mendorong perusahaan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham, mendorong tumbuhnya investasi di Indonesia karena dikenakan tarif lebih rendah dan meningkatkan kepatuhan WP.
2. Pembebasan kewajiban pembayaran fiskal luar negeri bagi WP yang telah mempunyai NPWP fiskal sejak 2009 serta penghapusan pemungutan fiskal luar negeri pada tahun 2011. Pembayaran fiskal luar negeri adalah pembayaran pajak di muka bagi orang pribadi yang akan bepergian ke luar negeri. Kebijakan penghapusan kewajiban pembayaran fiskal luar negeri bagi WP yang memiliki NPWP dimaksudkan untuk mendorong WP memiliki NPWP sehingga memperluas basis pajak. Diharapkan pada 2011 semua masyarakat yang wajib

memiliki NPWP telah memiliki NPWP sehingga kewajiban pembayaran fiskal luar negeri layak dihapuskan.

3. Peningkatan nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk diri WP orang pribadi sebesar 20% dari Rp 13,2 juta menjadi Rp 15,84 juta, sedangkan untuk tanggungan istri dan keluarga ditingkatkan sebesar 10% dari Rp 1,2 juta menjadi Rp 1,32 juta dengan paling banyak 3 tanggungan setiap keluarga. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan PTKP dengan perkembangan ekonomi dan moneter serta mengangkat pengaturannya dari peraturan Menteri Keuangan menjadi undang-undang.
4. Penerapan tarif pemotongan/pemungutan PPh yang lebih tinggi bagi WP yang tidak memiliki NPWP :
 - a) Pengenaan tarif 20% lebih tinggi dari tarif normal untuk WP non NPWP yang menerima penghasilan dipotong PPh Pasal 21.
 - b) Pengenaan tarif 100% lebih tinggi dari tarif normal untuk WP non NPWP yang menerima penghasilan dipotong PPh Pasal 23.
 - c) Pengenaan tarif 100% lebih tinggi dari tarif normal untuk WP non NPWP yang menerima penghasilan dipotong PPh Pasal 22.
5. Perluasan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Dimaksudkan bahwa pemerintah memberikan fasilitas kepada masyarakat yang secara nyata ikut berpartisipasi dalam kepentingan sosial, dengan diperkenalkannya biaya tersebut sebagai pengurang penghasilan bruto.

- a) Sumbangan dalam rangka penganggulangan bencana nasional dan infrastruktur.
 - b) Sosial Sumbangan dalam rangka fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia.
 - c) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga dan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia.
6. Pengecualian dari objek PPh
7. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh lembaga atau badan nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang ditanamkan kembali paling lama dalam jangka waktu 4 tahun tidak dikenai pajak.
- a) Beasiswa yang diterima atau diperoleh oleh penerima beasiswa tidak dikenai pajak.
 - b) Bantuan atau santunan yang diterima dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak dikenai pajak.

Selain itu perubahan Reformasi Pajak 2008 yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yaitu dengan mengenakan tarif berbeda pada wajib pajak perorangan dan wajib pajak badan. Diharapkan dengan tarif pajak yang baru, maka wajib pajak badan dapat lebih diuntungkan sehingga penerimaan dari wajib pajak lebih meningkat. Maka sudah selayaknya bila perpajakan harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Undang-Undang yang memberatkan dunia usaha, berdampak membuat banyaknya usaha tidak

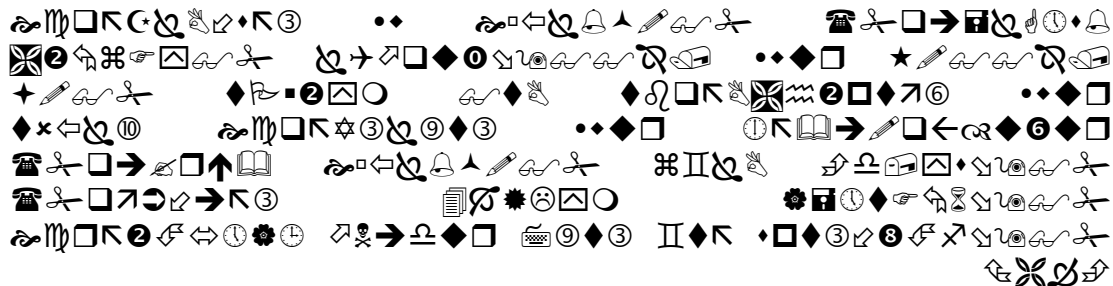
dapat memperoleh laba secara maksimal dan konsekuensinya akan mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak. Hal ini sejalan dengan literature di bidang akuntansi manajemen yang menjelaskan bahwa pajak dapat mempengaruhi capital budgeting melalui tax effect dalam penentuan aliran kas, pajak juga merupakan salah satu faktor utama dalam perencanaan sistem kompensasi manajemen.

2.6 Pajak Dalam Pandangan Islam

Pajak mengatur hubungan manusia dengan manusia nya (*Mu'amalah*), oleh sebab itu pajak merupakan bagian dari syariat. tanpa adanya rambu-rambu syariat dalam perpajakan, maka pajak dapat menjadi alat penindasan oleh penguasa kepada rakyat (Kaum Muslim). tanpa batasan syariat, pemerintah akan menetapkan dan memungut pajak sesuka hati dan menggunakannya menurut apa yang diinginkannya.

Dalam Islam, masalah pembayaran pajak merupakan salah satu masalah yang cukup serius dan harus diperhatikan. Hal ini mengingat pembayaran pajak dapat membantu mensejahterakan masyarakat luas jika disalurkan dengan baik dan benar. Dalam islam, pentingnya membayar pajak juga diterangkan oleh SWT dalam Al-Qur'an bahwa orang yang tidak mau membayar pajak atau jizyah boleh diperangi karena mereka tergolong orang-orang yang tidak beriman.

Firman Allah SWT :



Artinya : *“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.”*(Q.S At-taubah :29)

Yang dimaksud dengan “jizyah” adalah pajak perkepala yang dipungut oleh pemerintah islam dari orang-orang yang bukan islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. Menurut Gusfahmi (2007 : 26), Kaum muslimin sebagai pembayar pajak harus mempunyai batasan pemahaman yang jelas tentang pajak menurut pandangan islam, sehingga apa-apa yang dibayar memang termasuk hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah SWT sebagai suatu ibadah. Jika hal itu bukan perintah, tentunya ia tidak termasuk ibadah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di lokasi obyek penelitian, Yaitu Koperasi Unit Desa Karya Sembada Jl. Mawar II Barat, Desa Batang Batindih Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari subjek penelitian berupa data perusahaan, struktur organisasi, serta kegiatan usaha koperasi.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang mencakup pembukuan dan catatan-catatan akuntansi, seperti Laporan Perhitungan Laba Rugi, dan Neraca.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan penulis dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan cara :

- a. Wawancara, merupakan suatu metode pengumpulan data dengan mengadakan interview ataupun tatap muka secara langsung dengan pimpinan koperasi dan

pihak-pihak yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Data ini meliputi Gambaran-gambaran umum koperasi dan dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder.

- b. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data-data koperasi seperti laporan keuangan (neraca dan laba rugi), dan daftar aktiva tetap Koperasi Unit Desa Karya Sembada.

3.4 Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif komperatif yaitu membahas data dengan menyeluruh berdasarkan kenyataan dan dihubungkan dengan teori-teori yang ada untuk mendukung dalam pembahasan ini sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Latar Belakang Koperasi

Koperasi ini bernama Koperasi Unit Desa Karya Sembada dengan nama singkat Karya Sembada Pada tanggal 18 Desember 1991 sebagai rapat awal rancangan berdirinya dengan Badan Hukum 1619/BH /XIII dan berbadan Hukum akhir No.: 427/PAD/BH/IV.3/X/2009. Koperasi berkedudukan di UPT IV PIR NESS ADB SEI GALUH kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Atas dasar memperhatikan keadaan ekonomi masyarakat, senasib dan sepenanggungan, serta kebersamaan dalam meningkatkan perekonomian pedesaan. Gagasan tersebut atas kesepakatan bersama dilegalkan serta dikukuhkan secara aklamasi bernaung dalam suatu wadah organisasi koperasi dengan diberi nama awal “ KOPERASI UNIT DESA KARYA SEMBADA”.

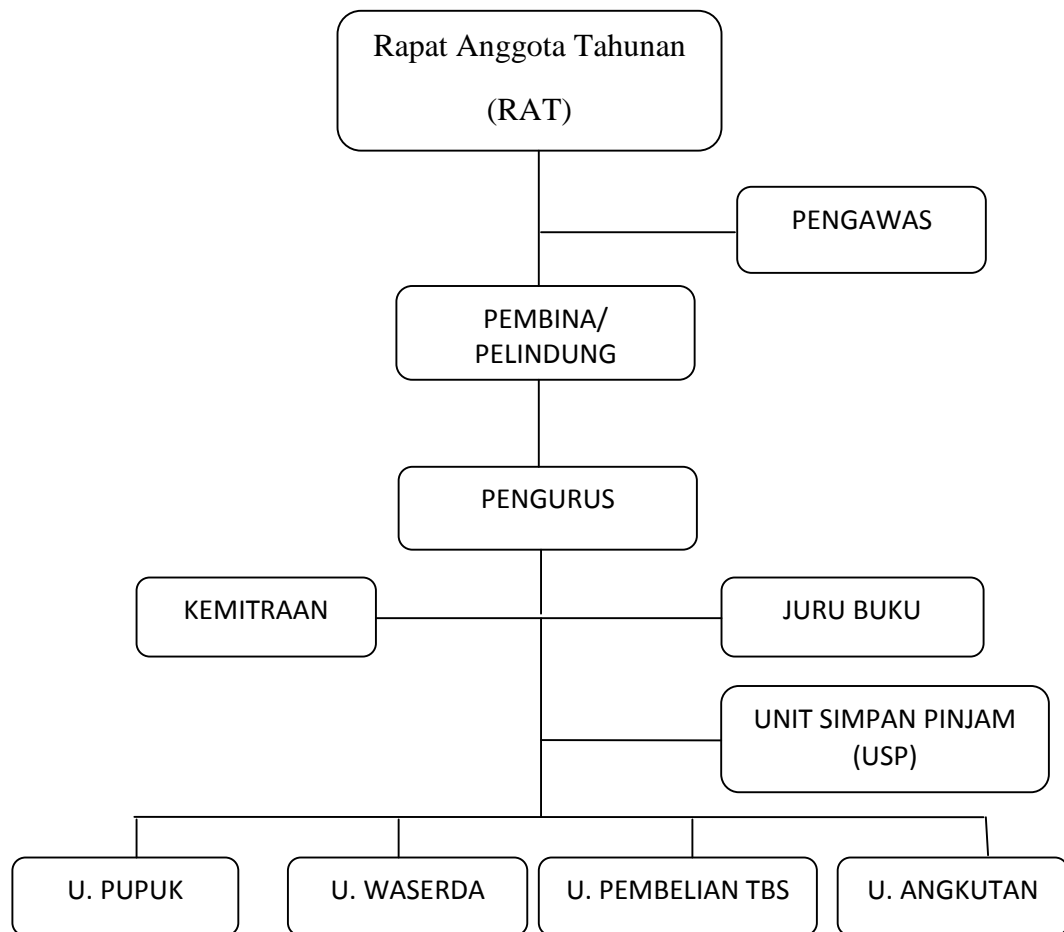
Daerah kerja koperasi ini adalah Wilayah Kecamatan Siak Hulu Desa Indrapura yang berada di Wlayah Kecamatan Siak Hulu Kab. Kampar Propinsi Riau. Setelah ada pemekaran wilayah kerja koperasi ini berada di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Keanggotaan KUD “ Karya Sembada” adalah petani sawit diwilayah Desa Batang Batindih Sampai awal Tahun 2012 jumlah anggota 434 orang.

4.2 Struktur Organisasi Koperasi

Sebagaimana halnya organisasi lain, maka sebuah koperasi perlu memiliki struktur organisasi yang bertujuan agar pelaksanaan tugas berjalan secara lancar dan pembagian wewenang serta tanggung jawab berlangsung dengan tertib karena terdapat pedoman yang mendasari pembagian tugas tersebut.

Koperasi Karya Sembada mempunyai struktur organisasi yang bersifat sederhana. Adapun struktur organisasi yang dimiliki Koperasi Karya Sawit ditunjukkan melalui gambar III.1 dibawah ini :

Gambar III.1
Struktur Organisasi
Koperasi Unit Desa Karya Sembada



Sumber: KUD Karya Sembada

4.3 Uraian Tugas

Adapun pembagian tugas untuk masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. Rapat Anggota

Rapat anggota bertugas membuat keputusan-keputusan yang dibutuhkan dalam mengelola KUD karya sambada yang merupakan hasil musyawarah seluruh anggota koperasi, dengan demikian pengurus, manajer, anggota serta karyawan koperasi harus mematuhi setiap keputusan yang dihasilkan oleh Rapat Anggota.

2. Pembina dan pelindung

Bertugas dalam melakukan pembinaan baik anggota, pengurus, ketua maupun karyawan koperasi.

3. Pengurus

Pengurus merupakan ujung tombak keberhasilan KUD karya sambada, untuk itu agar koperasi dapat berjalan dengan sebaik-baiknya pengurus koperasi harus dapat bertanggung jawabkan kinerjanya selama ini di dalam mengelola koperasi secara keseluruhan.

4. Pengawas

Bertugas melakukan pengawasan baik terhadap kinerja pengurus maupun dalam mengelola bidang usaha yang dimiliki koperasi. Pengawasan kemudian melaporkan setiap temuan-temuan yang ada kepada badan pelindung koperasi.

5. Karyawan

Untuk memperlancar bergeraknya roda koperasi, pengurus mengangkat 6 bagian karyawan dengan bagian Juru Buku, Bagian USP, Bagian Pembelian TBS, Bagian Pupuk, dan Bagian Waserda.

4.4 Aktivitas Koperasi

Koperasi Unit Desa Karya Sembada merupakan salah satu koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, angkutan sawit, waserda, sarana produksi dan pembelian TBS. Sebagaimana koperasi lainnya, maka Koperasi Karya Sembada ini memiliki beberapa bidang usaha seperti:

- a. Usaha Simpan Pinjam, yaitu bidang usaha yang memberikan pinjaman berupa uang kepada anggota koperasi dengan pembayaran secara cicilan per bulan.
- b. Usaha Waserda, yaitu bidang usaha yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok sehari-hari, seperti bahan makanan dan minuman bagi anggota maupun non anggota.
- c. Usaha Pembelian TBS, yaitu bidang usaha pembelian Tandan Buah Sawit (TBS) dari anggota maupun non anggota.
- d. Usaha Sarana Produksi, yaitu bidang usaha yang menyediakan kebutuhan perkebunan seperti pupuk, pestisida dan alat- alat kebutuhan produksi pertanian lainnya.
- e. Usaha Jasa Angkutan sawit adalah bidang usaha pengangkutan sawit dari kebun petani anggota maupun non anggota koperasi, selanjutnya dibawa ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Laporan Keuangan Koperasi Karya Sembada

Untuk meningkatkan aktivitas operasional suatu koperasi, maka koperasi perlu menyusun suatu laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara koperasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal.

Peranan laporan keuangan dalam koperasi dimaksudkan untuk dapat menyajikan informasi keuangan terhadap pengambil keputusan keuangan bagi suatu koperasi, sebab dengan adanya laporan keuangan maka koperasi dapat mengetahui keadaan dan posisi keuangan suatu koperasi.

Koperasi Karya Sembada bergerak dibidang Usaha Simpan Pinjam, Angkutan Sawit, Waserda, Sarana Produksi dan Pembelian TBS, dimana dalam melaksanakan pengelolaan aktivitas usahanya maka koperasi perlu melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan. Dengan pentingnya laporan keuangan bagi koperasi, untuk lebih jelasnya akan disajikan laporan keuangan yang meliputi : neraca dan laporan perhitungan hasil usaha yang dapat dilihat melalui tabel V.1 berikut ini :

Tabel V.1

KUD KARYA SEMBADA			
NERACA			
PER 31 DESEMBER 2012			
AKTIVA		PASSIVA	
AKTIVA LANCAR		KEWAJIBAN LANCAR	
Kas	Rp 751.882.403	Hutang BPR	Rp 166.666.900
Bank	Rp 3.500.000	Hutang LPDB	Rp 416.666.600
Deposito Bank Mandiri	Rp 75.000.000	Tabungan Berjangka	Rp 1.235.856.833
Piutang dagang	<u>Rp 2.444.414.600</u>	Bunga Tabungan	Rp 145.370.133
jumlah aktiva lancar	Rp 3.274.797.003	Simpanan SukaRela	Rp 349.928.203
		Insentif Kehadiran RAT	Rp 32.250.000
		Dana Bagian SHU	Rp 29.956.300
PENYERTAAN		Dana RAT	Rp 25.000.000
Pernyataan Pokok di PUSKUD	Rp 50.000	Pamel Jalan	Rp 14.821.015
Pernyataan Wajib di PUSKUD	<u>Rp 790.000</u>	Dana Audit	<u>Rp 10.000.000</u>
jumlah Penyertaan	Rp 840.000	jumlah Kewajiban Lancar	Rp 2.426.515.984
AKTIVA TETAP		KEKAYAAN	
Tanah	Rp 13.650.000	Simpanan Pokok	Rp 49.390.000
Bangunan	Rp 515.472.000	Simpanan Wajib	Rp 171.450.000
Peralatan Kantor	Rp 67.417.600	Donasi	Rp 307.942.300
Perlengkapan Kantor	Rp 24.210.300	Cadangan	Rp 349.928.203
Akk. Penyusutan	<u>Rp (149.184.530)</u>	SHU Tahun Berjalan	<u>Rp 452.935.886</u>
Nilai Buku	Rp 471.565.370	jumlah Kekayaan	Rp 1.331.646.389
AKTIVA LAIN-LAIN			
Surat-surat berharga	<u>Rp 10.960.000</u>		
jumlah Aktiva	<u>Rp 3.758.162.373</u>	jumlah Passiva	<u>Rp 3.758.162.373</u>

Sumber : Data diolah dari KUD Karya Sembada, 2012

Berdasarkan data mengenai neraca koperasi yang diperoleh dari Koperasi Karya Sembada maka selanjutnya akan disajikan Laporan Perhitungan Hasil Usaha periode 01 Januari s/d 31 Desember tahun 2012 yang dapat dilihat pada tabel V.2 berikut ini :

Tabel V.2
KUD KARYA SEMBADA
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA
PER 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2012

PENDAPATAN

Pendapatan Fee TBS	Rp	141.638.869
Pendapatan angkutan TBS	Rp	21.415.284
Pendapatan Fee Bank Mandiri	Rp	24.870.000
Pendapatan angsuran BRI	Rp	8.718.252
Pendapatan Fee Waserda	Rp	12.600.000
Pendapatan Fee Bank BNI	Rp	9.372.000
Pendapatan Fee PLN	Rp	28.819.175
Pendapatan Fee Pupuk	Rp	16.500.000
Pendapatan Penjualan Gedung Lama	<u>Rp</u>	<u>0</u>
	Rp	263.933.580

PENDAPATAN LAIN-LAIN

Pendapatan Jasa Unit Simpan Pinjam	Rp	659.906.100
Pendapatan Administrasi USP	Rp	22.358.000
Pendapatan Profesi	<u>Rp</u>	<u>45.392.048</u>
	Rp	727.656.148

Jumlah Pendapatan

Rp 991.589.728

BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

Beban ATK	Rp	3.726.000
Beban Insentif Kehadiran (Dana RAT)	Rp	32.250.000
Beban Jasa Simpanan/ Tabungan (Bunga)	Rp	122.712.361
Beban Bunga Pinjaman BPR	Rp	24.010.800
Beban Bunga Pinjaman LPDB	Rp	23.187.500
Beban Kelancaran Usaha	Rp	5.994.000

Beban Gaji Karyawan dan PPO	Rp	54.000.000
Beban Rapat	Rp	3.200.000
Beban Konsumsi	Rp	3.224.000
Beban Sumbangan	Rp	1.500.000
Beban RAT (Kekurangan Biaya RAT 2011)	Rp	8.709.000
Beban Perawatan Lingkungan	Rp	1.000.000
Beban Insentif Pengurus	Rp	58.688.966
Beban Perjalanan	Rp	21.010.000
Beban Insentif BPP dan Pengawas	Rp	14.400.000
Beban Petugas PLN	Rp	2.261.000
Beban Audit Tahun Buku 2011	Rp	0
Biaya Penghapusan asset lama	Rp	467.400
Beban Rekening Listrik	Rp	617.635
Beban Penjaga Aset	Rp	4.244.000
Profesi LPDB dan Notaris	Rp	32.500.000
Beban Profesi BPR	Rp	0
Beban Onpays Listrik	Rp	0
Beban Audit 2012	Rp	10.000.000
Beban Penyusutan	Rp	40.651.880
Biaya RAT	Rp	25.000.000
Beban THR	Rp	41.852.000
Jumlah Biaya Umum dan Administrasi	Rp	538.653.842
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak	Rp	452.935.886

Sumber : Data diolah dari KUD Karya Sembada, 2012

5.2 Laporan Keuangan Menurut Akuntansi dan UU Perpajakan

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Salah satu upaya yang perlu dilakukan perusahaan adalah dengan

melakukan koreksi fiskal yang bertujuan untuk menyajikan pelaporan keuangan komersil agar penyajiannya sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan badan.

Sebelum dilakukan penerapan koreksi fiskal, terlebih dahulu akan disajikan uraian item dari masing-masing pelaksanaan koreksi fiskal yaitu sebagai berikut :

1. Biaya penyusutan menurut akuntansi

Besarnya biaya penyusutan menurut akuntansi dapat dihitung dengan berbagai macam metode. Metode yang digunakan oleh koperasi adalah metode garis lurus. Namun dilihat dari perhitungan beban penyusutan menurut koperasi masih belum benar dalam perhitungan penyusutan dan disini peneliti ingin melakukan perhitungan penyusutan kembali. Besarnya biaya penyusutan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bangunan

Besarnya biaya penyusutan untuk bangunan adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rp. 515.472.000}}{20 \text{ tahun}} = \text{Rp. 25.773.600}$$

Jadi besarnya biaya penyusutan untuk bangunan per tahun adalah sebesar Rp. 25.773.600. (Selengkapnya hasil penyusutan bangunan per tahun dapat dilihat pada lampiran 2)

- b. Peralatan Kantor

Besarnya biaya penyusutan peralatan kantor adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rp. 74.391.400}}{5 \text{ tahun}} = \text{Rp. 14.878.280}$$

Jadi besarnya biaya penyusutan peralatan kantor per tahun adalah sebesar Rp.14.878.280. (Selengkapnya hasil penyusutan peralatan kantor pertahunnya dapat dilihat pada lampiran 6)

Untuk lebih jelasnya, hasil perhitungan penyusutan aktiva tetap menurut perusahaan per 31 Desember tahun 2012, dapat dilihat pada tabel 5.3 yaitu sebagai berikut :

Tabel 5.3
HASIL PENYUSUTAN AKTIVA TETAP (MENURUT KOPERASI)
TAHUN 2012

No	Jenis Aktiva Tetap	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Masa Manfaat (tahun)	Akumulasi Penyusutan s/d 2011	Biaya Penyusutan	
1	Tanah	1991	13.650.000				
2	Bangunan	2008	515.472.000	20	61.848.243	25.773.600	8
3	peralatan kantor	2006	74.391.400	5	32.996.507	14.878.280	5
	Jumlah		603.513.400		94.844.750	40.651.880	1

2. Biaya penyusutan menurut UU Perpajakan No. 36 tahun 2008.

Kemudian untuk menghitung biaya penyusutan jenis aktiva tetap menurut Undang-Undang Perpajakan, dapat dibagi ke dalam kelompok-kelompok dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Kelompok 1, untuk aktiva tetap yang masa manfaatnya 4 tahun dan tidak termasuk golongan bangunan, disusutkan dengan tarif 25 % untuk metode garis lurus dan tarif 50 % untuk saldo menurun.
- b) Kelompok 2, untuk aktiva tetap tetap yang masa manfaatnya 8 tahun dan tidak termasuk golongan bangunan disusutkan dengan tarif 12,5 %, metode garis lurus dan metode saldo menurun sebesar 25 %.
- c) Kelompok 3, untuk aktiva tetap yang masa manfaatnya 16 tahun dan tidak termasuk golongan bangunan disusutkan dengan tarif 6,25 % untuk metode garis lurus dan metode saldo menurun sebesar 12,5 %.
- d) Kelompok bangunan yang permanen disusutkan dengan tarif 5 % dan tidak permanen 10 % berdasarkan metode garis lurus.

Besarnya biaya penyusutan menurut Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 dapat diketahui melalui perhitungan di bawah ini :

a. Bangunan

Besarnya biaya penyusutan bangunan menurut Undang-Undang Perpajakan No.36 tahun 2008 adalah :

$$\text{Rp } 515.472.000 \times 5 \% = \text{Rp } 25.773.600$$

Jadi besarnya biaya penyusutan bangunan per tahun adalah sebesar
Rp.175.326.445.

b. Peralatan Kantor

Besarnya biaya penyusutan Peralatan Kantor menurut Undang-Undang
Perpajakan No. 36 tahun 2008 adalah :

$$\text{Rp. } 74.391.400 \times 25\% = \text{Rp. } 18.597.850$$

Jadi besarnya biaya penyusutan Peralatan Kantor per tahun adalah sebesar
Rp. 16.854.400,-

Untuk lebih jelasnya, hasil perhitungan penyusutan aktiva tetap menurut
Undang-Undang perpajakan No. 36 tahun 2008, dapat dilihat pada tabel V.4 yaitu
sebagai berikut :

Tabel V.4
HASIL PENYUSUTAN AKTIVA TETAP MENURUT UU PERPAJAKAN NO.36 TAHUN 2008
TAHUN 2012

N O	Jenis Aktiva tetap	Tahun Prllhn	Harga Perolehan	Golongan	Masa Manfaat (tahun)	Tarif Penyusutan	akumulasi Penyusutan s/d 2011	Biaya Penyusutan	akumulasi Penyusutan s/d 2012	Nilai (R)
1	Tanah	1991	13.650.000							13.65
2	Bangunan	2008	515.472.000	Bangunan	20	5%	61.848.243	25.773.600	87.621.843	427.8
3	peralatan kantor	2006	74.391.400	klpok 1	4	25%	32.996.507	18.597.850	59.513.120	14.8
	Jumlah		620.749.900				94.844.750	44.371.450	147.134.963	456.3

Berikut ini akan disajikan perbandingan biaya penyusutan menurut perusahaan dan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 yang dapat disajikan pada tabel V.5 yaitu sebagai berikut :

Tabel V.5

**PERBANDINGAN BIAYA PENYUSUTAN MENURUT PERUSAHAAN DENGAN
UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN NO.36 TAHUN 2008
PER 31 DESEMBER TAHUN 2012**

N O	Jenis Aktiva tetap	Biaya Penyusutan Menurut Perusahaan (Rp)	Biaya Penyusutan Menurut UU Perpajakan (Rp)	Selisih (Rp) (+/-)
1	Bangunan	25.773.600	25.773.600	0
2	Peralatan Kantor	14.878.280	18.597.850	3.719.570
	Jumlah	40.651.880	44.371.450	3.719.570

5.3 Koreksi Fiskal Pada KUD Karya Sembada

Koreksi Fiskal bertujuan untuk menyesuaikan laba komersial (yaitu laba yang dihitung menurut Prinsip Akuntansi Berlaku Umum) dengan ketentuan-ketentuan perpajakan sehingga diperoleh laba fiskal. Laporan Perhitungan Laba-Rugi yang dibuat perusahaan merupakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum. Oleh karena itu agar dapat menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang, perusahaan harus melakukan penyesuaian laporan perhitungan rugi-laba-nya tersebut agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan undang-undang perpajakan. Langkah penyesuaian ini dilakukan dengan cara mencari

pos-pos rekening yang berbeda perlakuan antara prinsip akun-tansi berlaku umum dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Pos-pos rekening ini yang perlu dilakukan koreksi fiskal.

Sebelum disajikan penerapan koreksi fiskal, maka terlebih dahulu akan disajikan data tambahan perusahaan yang berkaitan dengan penyusunan rekonsiliasi fiskal yaitu sebagai berikut :

1. Pendapatan Fee Bank Mandiri, angsuran BRI, dan Fee bank BNI.

Merupakan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak tersebut telah dipotong pajak penghasilan yang bersifat final sehingga tidak boleh ditambahkan pada pendapatan. Hal ini berdasarkan pada ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-undang pajak penghasilan No. 36 tahun 2008. karena penghasilan ini dari pihak ketiga yang telah memotong pajak terkait, untuk itu penghasilan ini perlu dikoreksi fiskal negatif agar tidak terjadi pemotongan pajak dua kali.

2. Biaya Sumbangan

Segala macam dan jenis sumbangan tidak diperkenankan dalam perpajakan kecuali sumbangan yang diatur secara resmi oleh Pemerintah melalui peraturan pemerintah. Hal ini berdasarkan pada ketentuan pasal 4 ayat (3a) Undang-undang pajak penghasilan No. 36 tahun 2008. Sehingga perlu dikoreksi positif sebesar Rp.1.500.000.

3. Biaya Penyusutan

Terdapat perbedaan biaya penyusutan menurut perusahaan dengan perpajakan sehingga perlu diadakan koreksi fiskal negatif karena mengurangi laba. selisih sebesar Rp 3.719.570 (lihat tabel V.5)

4. Beban THR

Pada laporan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Karya Sawit, koperasi memasukan beban THR sebagai pengurang penghasilan sebesar Rp.41.852.000. Dalam UU PPh No.36 Tahun 2008, biaya THR tidak boleh sebagai pengurang penghasilan karena termasuk biaya natura. kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan serta didaerah tertentu yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan. sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal positif.

Untuk lebih jelasnya akan disajikan rekonsiliasi fiskal yaitu sebagai berikut :

Tabel V.6
REKONSILIASI FISKAL LAPORAN LABA RUGI
PADA KUD KARYA SEMBADA

Uraian	Lap. Keu. Komersil	Koreksi Fiskal		Lap Fiskal
		POSITIV	NEGATIV	
PENDAPATAN				
Pendapatan Fee TBS	141.638.869			141.638.869
Pendapatan angkutan TBS	21.415.284			21.415.284
Pendapatan Fee Bank Mandiri	24.870.000		24.870.000	0
Pendapatan angsuran BRI	8.718.252		8.718.252	0
Pendapatan Fee Waserda	12.600.000			12.600.000
Pendapatan Fee Bank BNI	9.372.000		9.372.000	0
Pendapatan Fee PLN	28.819.175			28.819.175
Pendapatan Fee Pupuk	16.500.000			16.500.000
Pendapatan Penjualan Gedung Lama	-			-
	263.933.580			220.973.328
PENDAPATAN LAIN-LAIN				
Pendapatan Jasa Unit Simpan Pinjam	659.906.100			659.906.100
Pendapatan Administrasi USP	22.358.000			22.358.000
Pendapatan Profesi	45.392.048			45.392.048
	727.656.148			727.656.148
Jumlah Pendapatan	991.589.728			948.629.476
Biaya umum dan administrasi				
Beban ATK	3.726.000			3.726.000
Beban Insentif Kehadiran (Dana RAT)	32.250.000			32.250.000
Beban Jasa Simpanan/ Tabungan (Bunga)	122.712.361			122.712.361
Beban Bunga Pinjaman BPR	24.010.800			24.010.800
Beban Bunga Pinjaman LPDB	23.187.500			23.187.500
Beban Kelancaran Usaha	5.994.000			5.994.000
Beban Gaji Karyawan dan PPO	54.000.000			54.000.000
Beban Rapat	3.200.000			3.200.000
Beban Konsumsi	3.224.000			3.224.000
Beban Sumbangan	1.500.000	1.500.000		0
Beban RAT (Kekurangan Biaya RAT 2011)	8.709.000			8.709.000
Beban Perawatan Lingkungan	1.000.000			1.000.000
Beban Insentif Pengurus	58.688.966			58.688.966
Beban Perjalanan	21.010.000			21.010.000
Beban Insentif BPP dan Pengawas	14.400.000			14.400.000

Beban Petugas PLN	2.261.000			2.261.000
Beban Audit Tahun Buku 2011	-			-
Biaya Penghapusan asset lama	467.400			467.400
Beban Rekening Listrik	617.635			617.635
Beban Penjaga Aset	4.244.000			4.244.000
Profesi LPDB dan Notaris	32.500.000			32.500.000
Beban Profesi BPR	-			-
Beban Onpays Listrik	-			-
Beban Audit 2012	10.000.000			10.000.000
Beban Penyusutan	40.651.880	-	3.719.570	44.371.450
Biaya RAT	25.000.000			25.000.000
Beban THR	41.852.000	41.852.000		-
Jumlah Biaya Umum dan Administrasi	535.206.542	43.352.000	46.679.822	495.574.112
Laba bersih sebelum pajak	456.383.186			453.055.364

Ikhtisar perhitungan laba kena pajak, pada KUD Karya Sembada, adalah sebagai berikut :

Laba bersih sebelum pajak	Rp. 456.383.186
Koreksi positif :	
- Beban sumbangan	Rp 1.500.000
- Beban THR	<u>Rp 41.852.000</u>
Jumlah	Rp 43.352.000
Koreksi Negatif :	
- Pendapatan fee bank mandiri	Rp 24.870.000
- Pendapatan angsuran BRI	Rp 8.718.252
- Pendapatan Fee Bank BNI	Rp 9.372.000
- Beban penyusutan	<u>Rp 3.719.570</u>
	<u>(Rp 46.679.822)</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 453.055.364
PPh Terutang	<u>Rp 56.631.920,5</u>
Laba Bersih Setelah Pajak	<u>Rp 396.423.443,5</u>

Dalam hubungannya dengan uraian tersebut di atas, laba kena pajak setelah dikoreksi fiskal terhadap laba akuntansi sebesar Rp 453.055.364, sehingga pajak penghasilan badan terutang tahun 2012 dapat ditentukan perhitungan dibawah ini :

Besarnya pajak penghasilan Terutang adalah:

$$(25\% \times 50\%) \times \text{Rp } 453.055.364 = \text{Rp } 56.631.920,5$$

Dengan demikian didapatkan Pajak Penghasilan Terutang Sebesar Rp56.631.920,5

5.4 Perhitungan PPh Pasal 29 dan Pasal 25

Perhitungan PPh pasal 29 dan Pasal 25 menurut fiskal dapat diuraikan sebagai berikut :

PPh Terutang	Rp 56.631.920,5
Pengurang :	
- Kredit Pajak	Rp -
- PPh Pasal 25	<u>Rp -</u>
Besarnya PPh kurang bayar (PPh Pasal 29)	Rp 56.631.920,5
jumlah bulan	<u>12</u>
angsuran PPh Pasal 25 perbulan	Rp 4.719.326,7

jadi besarnya PPh Pasal 29 KUD Karya Sembada adalah sebesar Rp56.631.920,5 dan PPh pasal 25 bulanan sebesar Rp 4.719.326,7

5.5 Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan

BAB VI

PENUTUP

Pada bab ini akan menyajikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis serta penulis menyertakan saran atas hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan di KUD Karya Sembada.

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan serta pembahasan sebelumnya diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam mengklasifikasikan antara aktiva tetap peralatan dan perlengkapan koperasi memasukan sebagian peralatan seperti: kursi, computer, calculator dan genset firman ke dalam perlengkapan dan peneliti melakukan pengklasifikasikan kembali pada peralatan dan perlengkapan. (lihat pada lampiran)
2. Setelah menghitung biaya penyusutan aktiva tetap baik yang secara akuntansi dan perpajakan Terdapat selisih dalam menghitung penyusutan aktiva tetap sebesar Rp 3.719.570. dan aktiva penyusutan.
3. Terdapat penghasilan yang bersifat final sehingga tidak boleh ditambahkan pada pendapatan. Karena penghasilan ini dari pihak ketiga yang telah memotong pajak terkait, untuk itu penghasilan ini harus dikoreksi positif agar tidak terjadi pemotongan pajak dua kali.

4. Terdapat biaya yang tidak boleh sebagai pengurang penghasilan bruto yaitu beban sumbangan dan beban THR.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, selanjutnya dapat diberikan saran-saran sebagai bahan masukan bagi pihak koperasi yaitu sebagai berikut :

1. Dalam menghitung dan mengklasifikasikan aktiva tetap lebih diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan dan akan berpengaruh pada perhitungan pajak penghasilan terutang.
2. Disarankan kepada KUD karya sambada agar mengikuti perhitungan penyusutan aktiva tetap sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008.
3. Dalam perhitungan pajak penghasilan badan, koperasi sebaiknya berpedoman penuh atas Undang-undang perpajakan yang berlaku umum, agar penyajian laporan keuangan yang disusun perusahaan akan lebih wajar.
4. Sebaiknya koperasi mengikuti perkembangan pembaharuan peraturan perpajakan yang digunakan, agar koperasi dapat menerapkan pajak penghasilan dengan baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahannya, Surat At-taubah : 29
- Agoes Sukrisno dan estralita trisnamati, 2012. *Akuntansi perpajakan*, edisi 2 revisi. Jakarta: salemba empat
- Darmin, Nasution, 2009, *Target Pajak Optimis Dapat Terlampaui*.
<http://www.konten.co.id>
- Fitriandi Primandita, dkk. 2011. *kompilasi undang-undang perpajakan terlengkap*, Jakarta : salemba empat
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2009, *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta
- Mardiasmo, 2008. *Perpajakan*, edisi revisi, Yogyakarta: Andi
- Muljono Djoko, 2007. *Pemotongan Pemungutan PPh dan PPh Pasal 25/29*. Yogyakarta: Andi
- Muljono Djoko, 2009. *Akuntansi Pajak*, edisi revisi,
- Purwono Herry, 2010 *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, Jakarta; penerbit erlangga
- Pratama Kharisma Biyan, 2013 *.Analisis Perhitungan PPh Badan Pada PT. Raja Indo di Makassar*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Rudianto, 2010, *Akuntansi Koperasi*, Jakarta : Erlangga
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Riahi Ahmed dan Belkaoui, 2006 *Teori Akuntansi*, edisi lima. Jakarta : salemba empat.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Alfabeta
- Supriyanto Eddy , 2011. *Akuntansi Perpajakan*, Edisi Pertama. Yogyakarta : Graham Ilmu

- Setiawan Agus, 2008. *Cara Mudah Menghitung PPh Badan dengan Undang-undang pajak*, Yogyakarta : Andi
- Trisnawani, Tuti. 2009. *Akuntansi Untuk Koperasi dan UKM*. Jakarta: salemba empat
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Undang-undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Waluyo. 2010. *Pajakan Indonesia*, edisi Sembilan, Jakarta: salemba empat
- Waluyo, 2008, *Akuntansi Pajak*, Jakarta: salemba empat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, Surat At-taubah : 29

Agoes Sukrisno dan estralita trisnamati, 2012. *Akuntansi perpajakan*, edisi 2 revisi. Jakarta: salemba empat

Ahmed Riahi dan Belkaoui, 2006 *Teori Akuntansi*, edisi lima. Jakarta : salemba empat.

Darmin, Nasution, 2009, *Target Pajak Optimis Dapat Terlampaui*. <http://www.konten.co.id>

Fitriandi Primandita, dkk. 2011. *kompilasi undang-undang perpajakan terlengkap*, Jakarta : salemba empat

Ikatan Akuntan Indonesia, 2009, *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta

Mardiasmo, 2008. *Perpajakan*, edisi revisi, Yogyakarta: Andi

Muljono Djoko, 2007. *Pemotongan Pemungutan PPh dan PPh Pasal 25/29*. Yogyakarta: Andi

Muljono Djoko, 2009. *Akuntansi Pajak*, edisi revisi,

Purwono Herry, 2010 *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, Jakarta; penerbit erlangga

Pratama Kharisma Biyan, 2013 *Analisis Perhitungan PPh Badan Pada PT. Raja Indo di Makassar*. Universitas Hasanuddin Makassar.

Rudianto, 2010, *Akuntansi Koperasi*, Jakarta : Erlangga

Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Alfabeta

Supriyanto Eddy , 2011. *Akuntansi Perpajakan*, Edisi Pertama. Yogyakarta : Graham Ilmu

Setiawan Agus, 2008. *Cara Mudah Menghitung PPh Badan dengan Undang-undang pajak*, Yogyakarta : Andi

Trisnawani, Tuti. 2009. *Akuntansi Untuk Koperasi dan UKM*. Jakarta: salemba empat

Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-undang perpajakan nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Waluyo. 2010. *Pajakan Indonesia*, edisi Sembilan, Jakarta: salemba empat

Waluyo, 2008, *Akuntansi Pajak*, Jakarta: salemba empat.